



RENCANA KERJA TAHUNAN

BTKLPP KELAS I MAKASSAR

TAHUN ANGGARAN 2018

JL Wijaya Kusuma Raya 29-31
Kota MAKASSAR Provinsi Sulawesi
Selatan Telp/Fax : (0411) 871620.
Email : btklmakassar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BTKLPP Kelas I MAKASSAR Tahun 2018 dapat tersusun. Sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2018

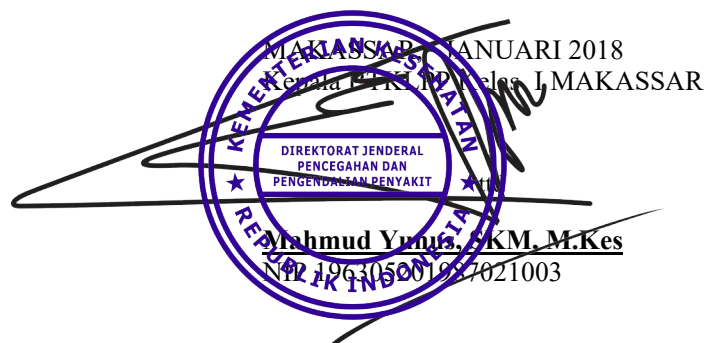
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja yang baik, oleh karenanya RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BTKLPP Kelas I Makassar.

Penyusunan RKT didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan No. 2349/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I MAKASSAR Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Kelas I MAKASSAR Tahun 2015-2019. RKT BTKLPP Kelas I MAKASSAR memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan BTKLPP Kelas I MAKASSAR Tahun 2018. Namun demikian, RKT juga bukan merupakan dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, kamicapkan banyak terima kasih



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1).Upaya kesehatan 2). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3). Aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 4). Sumber daya manusia kesehatan 5). Penelitian dan pengembangan 6). Pembiayaan Kesehatan, 7) Manajemen, regulasi dan sistem informasi. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Sesuai dengan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kementerian Kesehatan 2015-2019 sebagai kelanjutan dari pembangunan jangka menengah 2010-2014, maka di bidang kesehatan telah disusun rencana strategis pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2015-2019 sebagai bagian pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kesehatan antara lain memuat arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta program-program dan tata cara penyelenggaraan, pemantauan dan penilaian yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 upaya pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Salah satu program dalam lingkup pembangunan kesehatan adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit. Program ini diarahkan agar berbagai penyakit menular, penyakit tidak menular dan faktor risikonya dapat terkendali dan diupayakan tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Rencana Aksi Program (RAP) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementerian Kesehatan dan secara teknis menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal P2P dengan tujuan menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa.

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP & PL ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Direktorat Jenderal P2P dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat pokok - pokok kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar yang akan dilaksanakan pada periode waktu 2015-2019. Pola pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pokok dalam rencana aksi ini adalah Meningkatkan Jejaring Kerja dan Kemitraan, Memperkuat Kinerja Surveilans Berbasis Laboratorium, Meningkatkan Kinerja Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan,

Meningkatkan Kemampuan Dalam Rancang Bangun Model dan Teknologi Tepat Guna serta Memperkuat Daerah Melalui Rujukan, Uji Kendali Mutu, dan Kalibrasi.

Rencana Aksi BTKLPP Kelas I MAKASSAR Tahun 2015 - 2019 dilandasi oleh tugas dan fungsi berdasarkan organisasi dan tata kerja BTKLPP Kelas I MAKASSAR dalam mencapai sasaran prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Peningkatan kemampuan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan serta Peningkatan Kemampuan Kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BTKLPP Kelas I MAKASSAR melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan surveilans epidemiologi;
2. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
3. Pelaksanaan laboratorium rujukan;
4. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;
7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata;
10. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/MENKES/PER/ XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan tata kerja UPT dibidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar mempunyai wilayah kerja regional meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Secara bertahap BTKLPP Kelas I Makassar telah melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara optimal dan mampu menjalankan peran dalam surveilans epidemiologi berbasis laboratorium, dan diharapkan mampu mendukung serta mempercepat pencapaian sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

B. Tujuan

RKT BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Aksi dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja BTKLPP Kelas I Makassar. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Sebagai landasan penyusunan anggaran BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2018.
- b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2018;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BTKLPP Kelas I Makassar

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2015 - 2019 visi dan misi mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mendukung misi Kementerian Kesehatan maka BTKLPP Kelas I Makassar melaksanakan misi sebagai berikut :

1. *Pertama*, Mengendalikan dampak kesehatan lingkungan dan faktor risiko dengan menerapkan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kajian dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB berbasis lingkungan.
 - b. Melaksanakan Kajian Kualitas air minum di wilayah berpotensi KLB berbasis Laboratorium.
 - c. Melaksanakan Desiminasi informasi dan advokasi hasil kajian.
 - d. Melaksanakan Surveilans kesehatan pada situasi khusus.
2. *Kedua*, Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Surveilans Epidemiologi dalam upaya kesiapsiagaan serta respon cepat dalam penanggulangan KLB , Wabah / Bencana, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pertemuan Koordinasi Jejaring Surveilans dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon dengan propinsi di Wilayah Kerja BTKL
 - b. Kemitraan dalam Rangka Penguatan Kewaspadaan Dini dan Respon Penanggulangan KLB.
 - c. Surveilans FR Penyakit berbasis lingkungan.
 - d. Pelatihan/workshop.

- e. Layanan Informasi Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium
 - f. Layanan Respon KLB dan Wabah
 - g. Pelaksanaan Respon Cepat Dan Penaggulanagn KLB/Wabah.
3. *Ketiga*, Menyelenggarakan pelayanan laboratorium dan penerapan teknologi tepat guna yang bermutu dan profesional, melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengolahan Limbah Rumah Tangga
 - b. Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penurunan tingkat kesadahan FE dan Mangan.
 - c. Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penyaringan air bersih sederhana skala RT
 - d. Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Chlorinator manual.
 - e. Peningkatan mutu hasil pemeriksaan serta melengkapi kemampuan peralatan laboratorium kesehatan lingkungan, diagnostik dan kalibrasi
 - f. Peningkatan kemampuan dan jangkauan pelayanan pemeriksaan
 - g. Kalibrasi dan standarisasi peralatan laboratorium
 - h. Meningkatkan mutu laboratorium dan pelayanan pelanggan dengan menerapkan manajemen mutu sesuai dengan ISO IEC - 17025 2005 secara konsisten.
4. *Keempat*, Meningkatkan Jejaring Kerja Surveilans Epidemiologi dan Kerjasama Kemitraan, melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Surveilans terkait Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2 PTVZ).
 - b. Surveilans terkait Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2 PML).
 - c. Surveilans terkait Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2 PTM).
5. *Kelima*, Meningkatkan Profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya manusia (SDM), melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendidikan dan pelatihan tenaga Teknis dan Administrasi.
 - b. Peningkatan profesionalisme melalui magang di Instansi yang berkompeten.
 - c. Peningkatan dan pemberian kesempatan mengikuti pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar.
 - d. Peningkatan jejaring kerja / networking antar laboratorium kesehatan lingkungan.

II.2. Tujuan

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada tujuan tersebut di atas, dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Dukungan Direktorat Jenderal P2P terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui:

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

II.3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang akan dicapai BTKLPP Kelas I MAKASSAR merupakan bagian dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang tercantum dalam Rencana Aksi Program P2P Tahun 2015-2019.

Adapun sasaran strategis BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ditandai dengan :

1. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL sebesar 100%
2. Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi 4.500 setfikat
3. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium sebanyak 22 Rekomendasi
4. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan 4 TTG
5. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic sebanyak 54 rekomendasi
6. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung sebanyak 9 rekomendasi
7. Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP sebanyak 18 laporan
8. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 40 dokumen
9. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 11 jenis
10. Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 32 unit

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi BTKLPP Kelas I Makassar didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Direktorat Jenderal P2P. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
- b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
- d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompokkelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Arah kebijakan kementerian kesehatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk arah Kebijakan Eselon I Ditjen P2P yakni :

1. Peningkatan surveilans faktor risiko epidemiologi dan penyakit.
2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko.

3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko lingkungan
4. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan
5. Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang berdimensi Internasional;
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
7. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat;
8. Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Kelompok sasaran strategis pada upaya strategi kementerian kesehatan tahun 2015- 2019 salah satunya adalah meningkatkan pengendalian penyakit yang meliputi:

1. Pengendalian penyakit menular

Peran BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular adalah melalui peningkatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit menular yang difokuskan pada :

- a. Masyarakat di wilayah layanan terlindungi dari ancaman penyakit menular.
- b. Seluruh wilayah layanan yang endemis, rawan bencana, potensial KLB/wabah/ KKM .

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menular berbasis laboratorium.
- b. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana di wilayah layanan.
- c. Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit menular.
- d. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna.
- f. Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengendalian penyakit menular.
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium.

2. Pengendalian penyakit tidak menular

Peran BTKLPP Kelas I Makassar untuk penyakit tidak menular melalui peningkatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit tidak menular berbasis laboratorium difokuskan pada masyarakat di wilayah layanan termasuk mengembangkan Posbindu BTKLPP Kelas I Makassar.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit tidak menular berbasis laboratorium
- b. Melaksanakan advokasi pengendalian penyakit tidak menular;
- c. Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit tidak menular;
- d. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit tidak menular;
- e. Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program pengendalian penyakit tidak menular;
- f. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit tidak menular.

3. **Penyehatan lingkungan,**

Strategi yang dilakukan BTKLPP Kelas I Makassar dalam Penyehatan lingkungan antara lain :

- a. Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi kesehatan lingkungan.
- b. Pengembangan laboratorium penyehatan lingkungan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna
- d. Melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan baik fisik, kimia maupun biologi
- e. Melaksanakan kemitraan dan jejaring kerja program kesehatan lingkungan.

B. Strategi

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi pencapaian berdasarkan arah kebijakan yang diambil.

Adapun strategi :

- a. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- b. Meningkatkan komunikasi, advokasi, dan diseminasi informasi.
- c. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi.
- d. Meningkatkan jaringan informasi.
- e. Meningkatkan kemampuan analisis situasi, resiko, kecenderungan, pemetaan serta respon cepat.
- f. Meningkatkan kemampuan dalam pengamatan dan analisis faktor risiko lingkungan melalui Analisis Faktor Risiko Lingkungan melalui pemetaan hasil kajian.
- g. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
- h. Meningkatkan profesionalisme SDM.

- i. Meningkatkan dukungan pembinaan karier pegawai melalui jenjang fungsional.
- j. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan prima.

C. Pokok Pokok Kegiatan

Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	100 persen
		2. Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	4500 sertifikat
		3. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	22 rekomendasi
		4. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4 TTG
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	5. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	54 rekomendasi
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	9 rekomendasi
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7. Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	18 laporan
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		9. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	11 jenis
		10. Jumlah pengadaan sarana prasarana	32 unit

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2018 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan turunan dari rencana aksi yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator kegiatan berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Sesuai dengan dinamika penyelenggaraan program dimungkinkan dokumen perencanaan ini dilakukan review atau revisi yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan dan pencapaian sasaran. Berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam dokumen perencanaan ini akan tetap diidentifikasi dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk melakukan koreksi sesuai dengan kebutuhan.